

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN
INTERN AKUNTANSI TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH**

(Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan)

**Warih Komarasari
13133100174**

ABSTRACT

The research purpose is to know the factors that influence the quality of information value of local government financial reporter. This information value quality measured by reliability, the factors that influence are human resource capacity, utilization of information technology, and accounting intern control.

This research was done in Local Government Unit of Bantul District with respondent, head and staff accounting. This research used purposive sampling. Data research used questionnaire survey, the questionnaire given to 23 SKPD in Bantul Resident about 115 questionnaires and about 94 questionnaires (82%) can be processed. The data then process by using SPSS 16.0. Statistic method used double regression.

The hypothesis test result shows that the variable of utilization of information technology and accounting intern control influences significantly to reliability of local government financial reporter. However human resource capacity is not influence significantly to reliability of local government financial reporter.

Key word: Information value, Reliability, capacity, information technology, and intern control.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas nilai informasi tersebut diukur dengan keterandalan, faktor yang mempengaruhi adalah kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi.

Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Bantul dengan responden kepala dan staf bagian akuntansi dan keuangan. Menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan survei kuesioner, kuisisioner dibagikan kepada 23 SKPD di Kabupaten Bantul sebanyak 115 kuisisioner dan di diperoleh 94 kuisisioner (82%) yang dapat diolah. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan SPSS versi 16.0. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Nilai Informasi, Keterandalan, Kapasitas, Teknologi Informasi, Pengendalian Intern.

PENDAHULUAN

Masih banyak fenomena laporan keuangan pemerintah daerah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih terdapat penyimpangan-penyimpangan, hal ini mendorong meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk menerapkan akuntabilitas publik yaitu melalui suatu media pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang dilaksanakan secara periodik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan daerah agar informasi yang diperoleh handal, mengingat bahwa keterandalan merupakan salah satu unsur penting nilai informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbagai pihak yang bersangkutan (Mardiasmo, 2002:20).

PP No 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa keterandalan laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tidak akan mempercayai informasi yang disajikan (Primayana, Atmaja dan Darmawan, 2014).

Faktor pertama yang mempengaruhi keterandalan penyusunan laporan keuangan daerah adalah kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Terbatasnya pegawai pemerintah yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman atau penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan tanggungjawab dan menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik keterandalan, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting (Karmila, Tanjung dan Darlis, 2014).

Faktor kedua yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Kapasitas sumber daya manusia yang memadai belum tentu bisa menghasilkan laporan keuangan yang andal jika tidak didukung dengan teknologi informasi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik, selain itu dengan menggunakan teknologi informasi salah satunya komputer dalam menghitung dan menyusun laporan keuangan akan lebih cepat, akurat dan konsisten dari pada sistem manual (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Faktor ketiga yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan daerah adalah pengendalian intern akuntansi. Penyusunan laporan keuangan tentu saja sering terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, oleh karena itu untuk meyakinkan *stakeholder* maupun publik mengenai keakuratan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah dibutuhkan sistem pengendalian intern yang optimal. Sebuah sistem pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk meniadakan semua peluang terjadinya kesalahan atau penyelewengan, akan tetapi sebuah sistem pengendalian intern yang baik dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang dapat dianggap layak, serta seandainya hal tersebut terjadi maka akan segera dapat diketahui dan diatasi (Purwono, 2007:120).

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk mengembangkan penelitian tentang “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Inern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan di SKPD Kabupaten Bantul Bagian Keuangan dan Akuntansi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan TI dan pengendalian intern akuntansi terhadap Keterandalan pelaporan keuangan daerah.

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

1. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah struktur dan proses meliputi segala aspek yang berkaitan dengan bagaimana penyediaan, pelaporan dan penyampaian informasi keuangan suatu pemerintahan disediakan dan dilaporkan

untuk mencapai tujuan pelaporan yang akan membantu pencapaian tujuan ekonomik dan sosial (Suwardjono, 2012:110). Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat, peraturan yang berlaku termasuk PABU, dan mekanisme penyampaian informasi. Sedangkan laporan keuangan merupakan medium dalam penyampaian informasi. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan suatu daerah dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

2. Keterandalan Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah

Informasi yang bermanfaat bagi pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai, termasuk laporan keuangan. Hal itu agar informasi tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Kualitas nilai informasi laporan keuangan sangatlah penting salah satunya diukur dengan keterandalan seperti yang tertera pada PP No 71 Tahun 2010. Mengingat bahwa keterandalan merupakan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah (Angraeni, 2014).

PP No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menyebutkan bahwa keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasional, sumber daya manusia mencakup tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman dan pelatihan. Sumber daya manusia harus baik karena sumber daya manusia yang baik akan menunjukkan kapasitas sumber daya yang baik juga. Manusia bertanggung jawab untuk mengelola organisasi, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan elemen penting dan selalu ada dalam organisasi (Hullah, dkk. 2012).

Jumlah sumber daya manusia yang tepat dan dengan kompetensi yang baik akan mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan daerah oleh karena itu,

kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia saling berhubungan. Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem yang digunakan untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Penelitian mengenai kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam pelaksanaan keuangan daerah pernah dilakukan oleh Primayana, dkk. (2014); Sari dan Witono (2014) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Oleh karena itu diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan teknologi yang mempunyai kemampuan untuk menangkap (*capture*), menyimpan (*store*), mengolah (*process*), mengambil kembali (*retrieve*) dan menyebarkan (*transmit*) informasi dan sebagai sarana dalam meningkatkan kinerja baik pemerintahan maupun perusahaan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi tersebut (wansyah, dkk. 2009).

Pemanfaatan teknologi informasi, khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik, mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi/instansi pemerintah dalam kerangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pelaksanaan *e-government* (Hamzah, 2009). Perubahan dalam pola penyusunan laporan keuangan daerah yang awalnya secara manual dilihat tidak efektif, efisien dan untuk nilai keandalan suatu laporan keuangan masih kurang keakuratannya karena penyusunan laporan keuangan secara manual lebih besar resiko terjadi kesalahan, oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan daerah sangatlah dibutuhkan, teknologi informasi yang salah satu contohnya komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan yang sedang dikerjakan, dengan menggunakan komputer akan lebih akurat dan konsisten dalam melakukan perhitungan (Primayana, dkk. 2014).

Penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi pernah dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008) dan Hullah, dkk. (2012) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Oleh karena itu diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

5. Pengendalian Intern Akuntansi

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern Akuntansi merupakan rencana organisasi dan metode yang bertujuan untuk mengamankan aset yang ada pada organisasi tersebut, serta menguji sejauh mana data akuntansi dapat dipercaya. Pengendalian intern digunakan untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana suatu dikerjakan dan mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang sudah ditetapkan. Pengendalian Intern tidak digunakan untuk menghilangkan peluang terjadinya kesalahan dan kecurangan, tetapi dengan adanya pengendalian intern yang baik akan menekan resiko terjadinya hal tersebut sehingga dapat segera diketahui dan diatasi secara cepat agar tidak menimbulkan kerugian. Pelaksanaan pengendalian intern dapat dilakukan sebelum, selama dan sesudah terjadinya kegiatan yang tujuannya adalah untuk menguji akurasi dan keandalan data akuntansi dan menjamin efisiensi operasi. Pengendalian akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya (Purwono, 2004:126).

Penelitian mengenai pengendalian intern akuntansi pernah dilakukan oleh Primayana, dkk. (2014); Sari dan Witono (2014) yang menyatakan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Oleh karena itu diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2016 sampai dengan November 2016. Data diperoleh dari sebagian SKPD Kabupaten Bantul. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD di Kabupaten Bantul. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 115 responden.

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Keterandalan pelaporan keuangan daerah, Variabel ini diukur dengan menggunakan 7 item pertanyaan yang mengacu pada Indriasari dan Nahartyo (2008). Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan penyajian setiap fakta informasi dalam laporan keuangan secara jujur, penyajian informasi dalam laporan keuangan yang dapat diverifikasi, serta penyajian informasi dalam laporan keuangan yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan tertentu dan Peraturan Menteri Keuangan Badan Layanan Umum yaitu berkaitan dengan penyajian Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan serta adanya Rekonsiliasi secara periodik. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert.
- b. Kapasitas Sumber Daya Manusia, Variabel ini diukur dengan menggunakan 10 item pertanyaan yang mengacu pada Indriasari dan Nahartyo (2008) yang diukur menggunakan skala likert, yaitu terdiri dari pertanyaan berkaitan dengan jumlah staf yang ada, latar belakang pendidikan akuntansi yang ada, peran dan tugas ditetapkan secara jelas, adanya pedoman dalam pelaksanaan proses akuntansi dan adanya operasional pendukung dalam melaksanakan tugas yang ada.
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Variabel ini diukur dengan menggunakan 8 item pertanyaan yang mengacu pada Indriasari dan Nahartyo (2008). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert, yaitu terdiri dari pertanyaan yang berkaitan dengan kecukupan jumlah komputer yang ada dan tersedia, jaringan internet sudah terpasang dan dimanfaatkan sesuai ketentuan, proses akuntansi dilakukan secara komputerisasi, adanya software pendukung, adanya jadwal pemeliharaan peralatan.

d. Pengendalian Intern Akuntansi, Variabel ini diukur dengan menggunakan 9 item pertanyaan yang mengacu pada Indriasari dan Nahartyo (2008) dengan pertanyaan yang sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert, yaitu terdiri dari pertanyaan yang berkaitan dengan sistem akuntansi yang ada, dokumen pendukung, adanya otorisasi pihak yang berwenang, adanya pencatatan pembukuan, adanya pemisahan tugas.

2. Teknik Analisis Data

a. Uji Validitas, digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner yang diukur menggunakan *coefficient correlation pearson* yaitu dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor dan apabila nilai sig. (2-tailed) berada dibawah 0,05 (5%) (Ghozali, 2011:52).

b. Uji Reliabilitas, adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Dilihat dari variabel yang memiliki Cronbach's Alpha lebih dari 0,6 (Ghozali, 2011:47).

c. Analisis Regresi Berganda, dilakukan untuk mengetahui pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

d. Uji t, Tingkat kepercayaan yang digunakan 95% atau taraf signifikan 5%, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bila probability t hitung $> 0,05$ Ho diterima dan H1 ditolak.
2. Bila probability t hitung $< 0,05$ Ho ditolak dan H1 diterima.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kuesioner yang kembali sebanyak 104 dan yang dapat digunakan sebanyak 94 kuisisioner yang dianggap lengkap. Tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) 90 % dan dapat digunakan (*respon use*) sebesar 82%, dengan karakteristik responden paling banyak yaitu perempuan sebanyak 55 orang (59%), mempunyai latar belakang pendidikan terakhir Strata 1 (S1) sebanyak 47 orang (50 %), bekerja lebih dari 10 tahun (57%), staf bagian akuntansi dan keuangan sebanyak 70 orang (74%).

Uji Validitas dan Reliabilitas dari semua item pertanyaan yang ada diperoleh hasil bahwa semua item pertanyaan dikatakan valid karena memiliki nilai dibawah 0,05, dan dikatan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0,6.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda:

Model	B	T	Sig
(<i>Constan</i>)	5,411	1,590	0,115
Kapasitas SDM	0,015	0,226	0,822
Pemanfaatan TI	0,254	2,137	0,035
Pengendalian Intern Akuntansi	0,410	4,319	0,000
F hitung = 18,171			0,000 ^a
<i>Adjust R Square</i> = .356			

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,411 + 0,015 X1 + 0,254 X2 + 0,410 X3$$

Hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R²) adalah 0,356, yang berarti seluruh variabel bebas (Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengendalian Intern Akuntansi) mempunyai kontribusi secara bersama-sama sebesar 35,6% terhadap variabel terikat (keterandalan), sedangkan 64,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Berdasarkan tabel diatas, pada uji F diperoleh hasil F hitung sebesar 18,171 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Berdasarkan nilai signifikan yang diperoleh 0,000 lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pada uji t yang pertama diperoleh t_{hitung} sebesar 0,226 dengan nilai signifikan sebesar 0,822 lebih sebesar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantul maka hipotesis pertama (H1) ditolak.

Pada uji t yang kedua diperoleh t_{hitung} sebesar 2,137 dengan nilai signifikan sebesar 0,035 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan

pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bantul maka hipotesis kedua (H_2) diterima.

Pada uji t yang ketiga diperoleh t_{hitung} sebesar 4,319 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bantul maka hipotesis ketiga (H_3) diterima.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang dirumuskan pada hipotesis penelitian dengan menggunakan uji analisis regresi linier berganda, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Variabel kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- c. Variabel pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Implikasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas nilai informasi laporan keuangan yang diukur dengan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah hanya dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern. Hal ini diharapkan bisa dijadikan acuan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan kapasitas sumber daya manusia yang ada, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dan pengendalian intern akuntansi yang memadai.

3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan dan kelemahan yang membatasi kesempurnaan hasil penelitian ini. Oleh karena itu, semoga dalam penelitian selanjutnya tersebut dapat disempurnakan.

- a. Penelitian ini dilakukan terbatas hanya di SKPD Kabupaten Bantul dan dari 35 SKPD hanya 23 SKPD yang bersedia mengisi kuisioner.

- b. Peneliti tidak berhadapan langsung dengan responden, karena ada beberapa SKPD yang membatasi akses peneliti terhadap responden, sehingga apabila ada pernyataan yang kurang jelas, responden tidak dapat mendapatkan keterangan lebih lanjut.
- c. Peneliti sulit untuk mendapatkan jaminan bahwa semua responden akan mengembalikan kuisioner yang diberikan, karena kuisioner yang diberikan tidak dapat dikembalikan hari itu juga.
- d. Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini hanya keterandalan.

4. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya antara lain :

- a. Penelitian ini tidak melakukan wawancara langsung pada masing-masing responden, sehingga peneliti tidak mengetahui alasan yang menjadi latar belakang jawaban setiap responden dalam penelitian ini. Jawaban yang diberikan oleh responden kemungkinan bukan merupakan jawaban sebenarnya. Sehingga pada penelitian selanjutnya bisa dilakukan wawancara secara langsung.
- b. Penelitian berikutnya dapat memperluas memperbesar jumlah sampel, misalnya mengambil sampel pada SKPD yang ada di kabupaten lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan memberikan gambaran yang lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraeni D, T. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 3 No. 3.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah. 2009. Pengaruh Ekspekstasi Kinerja, Ekspekstasi Usaha, Faktor Sosial, Kesesuaian Tugas dan Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten di Pulau Madura). *Simposium Nasional Sistem Teknnologi Informasi*. UGM.

- Hullah, Abdurahman R, dkk. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*. Vol. 3 No. 2, Desember.
- Indriasari, D dan Nahartyo, E. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *Simposium Nasional Akuntansi, XI*, Pontianak, Juli.
- Karmila, Tanjung A, R dan Darlis, E. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Riau). *Jurnal Sorot*. Vol. 9 No. 1, April, hal 1-121.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. No 59 Thn 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No 76 Thn 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Th. 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 2 No. 2.
- Edi Purwono. 2004. *Aspek-aspek EDP Audit Pengendalian Internal pada Komputerisasi*. Yogyakarta: Andi.
- Sari, S, P dan Witono, B. 2014. Keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah ditinjau dari sumber daya manusia, pengendalian internal dan pemanfaatan Teknologi informasi. *Sancall*. Hal. 418-425.
- Suwardjono. 2012. *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan*, Edisi Ketiga. BPFE-Yogyakarta.
- Wansyah H, Darwanis dan Bakar U. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kegiatan Pengendalian terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD pada Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1 No. 1, Agustus, hal 43-58.